



LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018



**DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG**

**JI. AHMAD YANINO. 76 TELP.(0562) 4203158
SINGKAWANG - 79123**

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang ini adalah merupakan wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi dinas atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017, selain itu LKT juga merupakan alat kendali dan alat penilai kinerja baik dalam lingkup internal pemerintah maupun lingkup eksternal. Dalam lingkup internal LKT merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas pada tahun anggaran 2017 dan evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dalam lingkup eksternal merupakan wujud pertanggung jawaban dinas kepada *stake holders* (Walikota, DPRD dan Publik).

Dalam pencapaian hasil kinerja tahunan ini sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh staf yang secara operasional maupun fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan program/ kegiatan di bidangnya masing – masing, serta tidak terlepas pula dari adanya dukungan dan kerja sama dari masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Dalam penyusunan LKT ini disadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai untuk kesempurnaannya di masa mendatang.

Singkawang, Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Singkawang

Drs. AHYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631123 199003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
LAMPIRAN	vii
LAMPIRAN I Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika..	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
A. Renstra	19
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
B. Realisasi	44
BAB IV. PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan	11
Tabel 1.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang.....	13
Tabel 1.3. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	14
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Diskominfo Kota Singkawang yang Mengacu Pada RPJMD Tahun 2018-2022	27
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja	30
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan	31
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	34
Tabel 3.2. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -1	36
Tabel 3.3. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -2.....	38
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	41
Tabel 3.5. Realisasi PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	45
Tabel 3.6. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	47
Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	48

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Singkawang	4

DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan.....	12
Diagram 1.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang	13
Diagram 1.3. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	15
Diagram 3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	34
Diagram 3.2. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -1	36
Diagram 3.3. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -2	39
Diagram 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja.....	41
Diagram 3.5. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	48
Diagram 3.6. Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	49

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment*, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari tahapan Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggung-jawab atas setiap kegiatan yang

dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 didasari oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggung-jawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat Esselon II ke atas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, yang membawahi :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
- c. Seksi Peliputan dan Publikasi

4. Bidang *E-Government* dan Telematika membawahi :

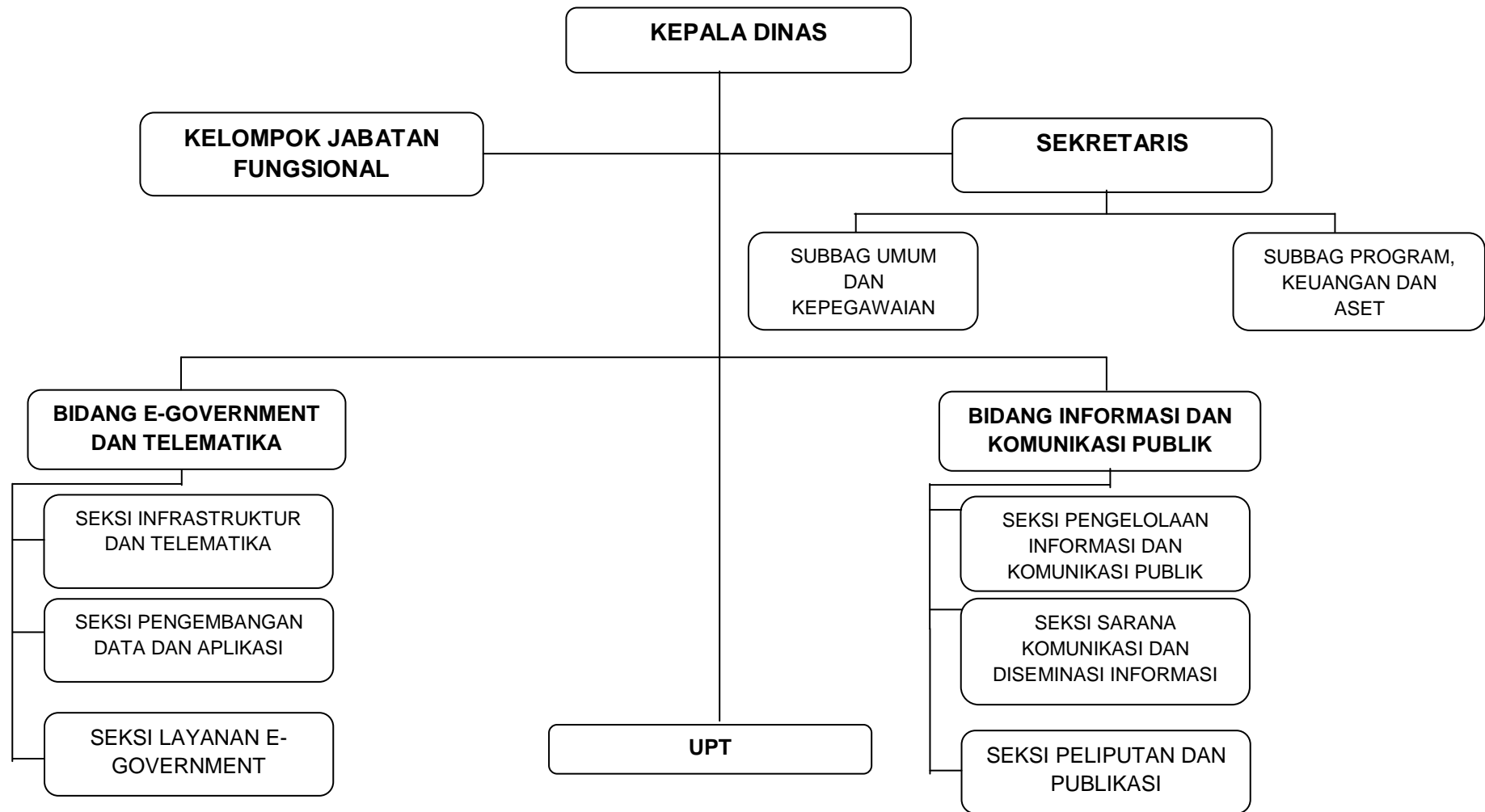
- a. Seksi Infrastruktur dan Telematika
- b. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi
- c. Seksi Layanan *E-Government*

5. Unit UPT

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang memiliki Struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang



2.1. Sekretariat

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administratif.

b. Fungsi

- Pengoordinasikan penyusunan program-program bidang secara terpadu.
- Pengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- Pengoordinasikan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas.
- Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi Umum dan Kepegawaian, Penyusunan Program, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi : menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah

tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) **Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis (perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan laporan kinerja dinas (LKT, LKPJ dan LPPD) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

2.2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas

Menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi, Peliputan dan Publikasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Peliputan, Publikasi dan Persandian.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi serta Seksi Peliputan dan Publikasi, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) **Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan petunjuk teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan pelayanan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijaksanaan nasional dan pemerintah daerah, dan memberikan pelayanan dan penyediaan akses informasi publik.

2) **Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, melaksanakan pembinaan kelompok informasi, media tradisional dan forum komunikasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

3) **Seksi** Peliputan dan Publikasi, mempunyai tugas :

Menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Peliputan dan Publikasi, melaksanakan pelayanan kerjasama dengan media massa, peliputan dan penyiaran kegiatan pemerintahan dan non pemerintahan dan pengelolaan media center.

2.3. Bidang *E-Government* dan Telematika

a. Tugas

Menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang *E-Government* dan Telematika yang meliputi Infrastruktur dan Telematika, Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi dan Data Center serta Layanan *E-Government*.

b. Fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang *E-Government* dan Telematika.
- Penyiapan bahan perumusan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Infrastruktur dan Telematika.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi dan Data Center.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Layanan *E-Government*.
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang *E-Government* dan Telematika.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang *E-Government* dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu : Seksi Infrastruktur dan Telematika, Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi, Seksi Layanan *E-Government*, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) **Seksi Infrastruktur dan Telematika**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengolahan data, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Infrastruktur dan Telematika, melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah, dan layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Singkawang dan layanan keamanan informasi.

2) **Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengolahan data, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Pengembangan Pengelolaan Data dan Aplikasi, melaksanakan pelayanan manajemen data dan informasi *e-government* dan statistik sektoral lingkup daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, pelaksanaan integrasi layanan publikasi dan pemerintahan, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* dan layanan *call center* 112 serta pengelolaan data center.

3) **Seksi Layanan *E-Government***, mempunyai tugas :

Menyusun rencana program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan layanan *e-government*, melaksanakan *Government Cheif Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Singkawang, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Singkawang

dan masyarakat, penyediaan layanan nama *domain* dan sub *domain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota, layanan keamanan informasi *e-goverment*, Sistem Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi daerah kepada portal pengadaan nasional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sedangkan susunan dan tata kerja berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, ketersediaan sumber daya aparatur / personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor penting yang harus dipenuhi. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh personil dinas yang tersedia. Dalam kaitan ini, permasalahan

yang dihadapi dinas adalah terbatasnya jumlah personil yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kekurangan jumlah personil sangat dirasakan ketika dihadapkan pada suatu tugas yang menjadi lingkup bidang tertentu, terpaksa dilaksanakan dengan / harus mendaya-gunakan sebagian / seluruh personil bidang lain yang pada skala tertentu dapat berakibat tertundanya tugas pokok personil yang bersangkutan.

Dari segi kualitas, dirasakan disiplin, kompetensi dan kemampuan personil masih belum sepenuhnya memadai. Pelaksanaan tugas dan permasalahan lapangan penyelesaiannya terkesan lambat, tidak tuntas dan sering berdampak pada beban bagi atasan. Pada sisi lain upaya untuk meningkatkan kemampuan personil melalui program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang semestinya karena kurangnya dukungan anggaran yang disediakan.

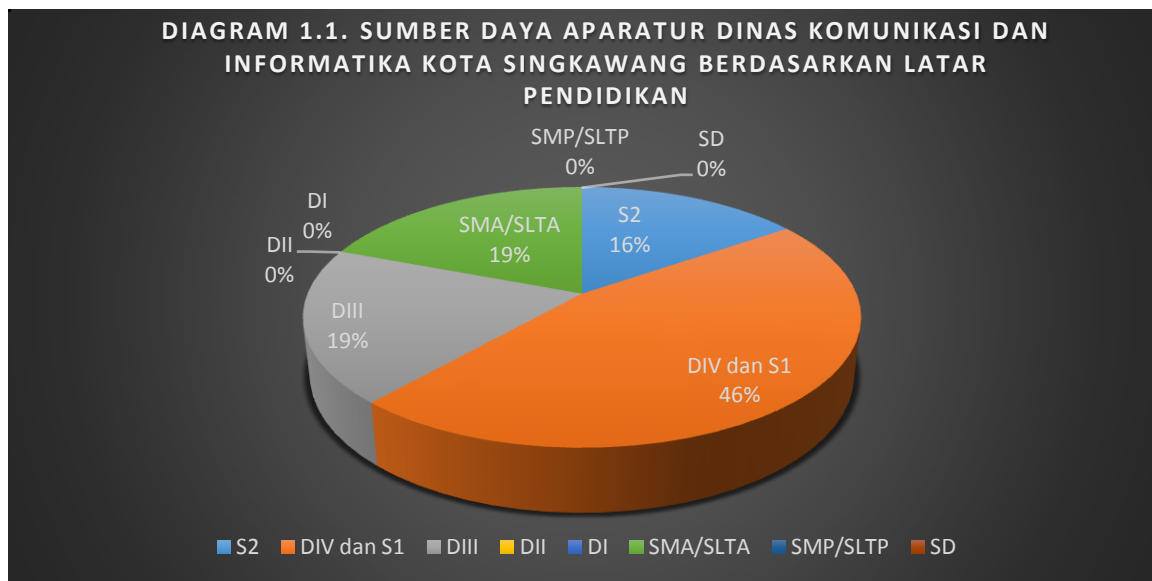
Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2018 berjumlah 35 orang yang terdiri dari 26 orang PNS, 5 orang Honorer/PTT dan 4 orang Outsourcing (Tenaga Programmer) yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menurut latar pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan

NO.	LATAR PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)		
		PNS	HONORER/PTT	OUTSOURCING
1.	S2	4	-	-
2.	DIV dan S1	12	1	4
3.	DIII	5	-	-
4.	DII	-	-	-
5.	DI	-	-	-

6.	SMA/SLTA	5	4	-
7.	SMP/SLTP	-	-	-
8.	SD	-	-	-
JUMLAH		26	5	4

Sumber : DUK Diskominfo per Desember 2018

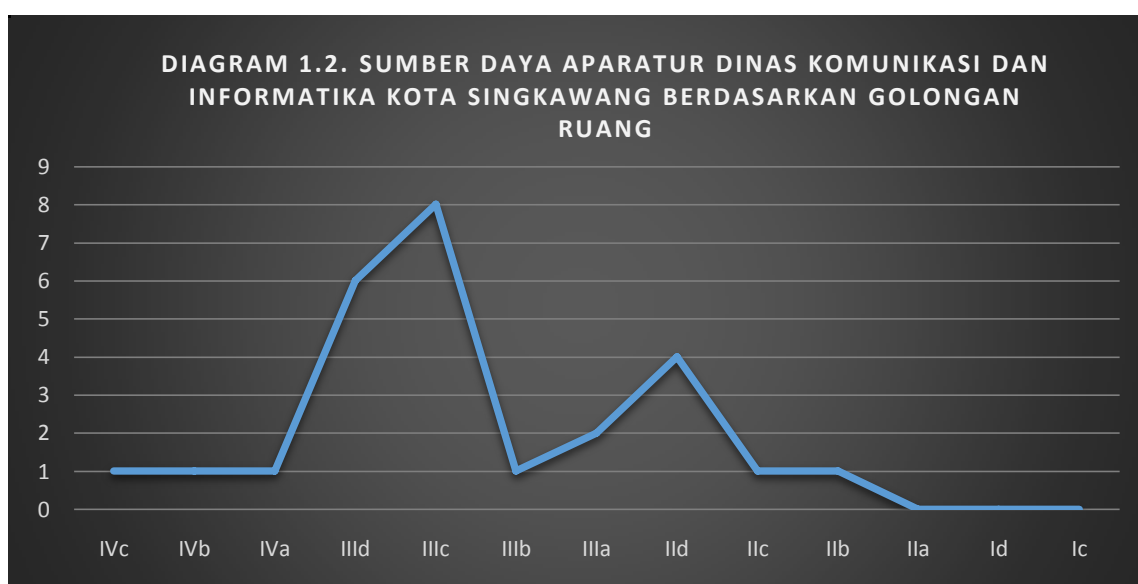


Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi *eksisting* menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat DIV dan S1.

Tabel 1.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	IVc	1
2.	IVb	1
3.	IVa	1
4.	IIIId	6
5.	IIIc	8
6.	IIId	1
7.	IIId	2
8.	IIId	4
9.	IIc	1
10.	IIb	1
11.	IId	-
12.	Id	-
13.	Ic	-
JUMLAH		26

Sumber : DUK Diskominfo per Desember 2018



5. Sumber Daya Keuangan

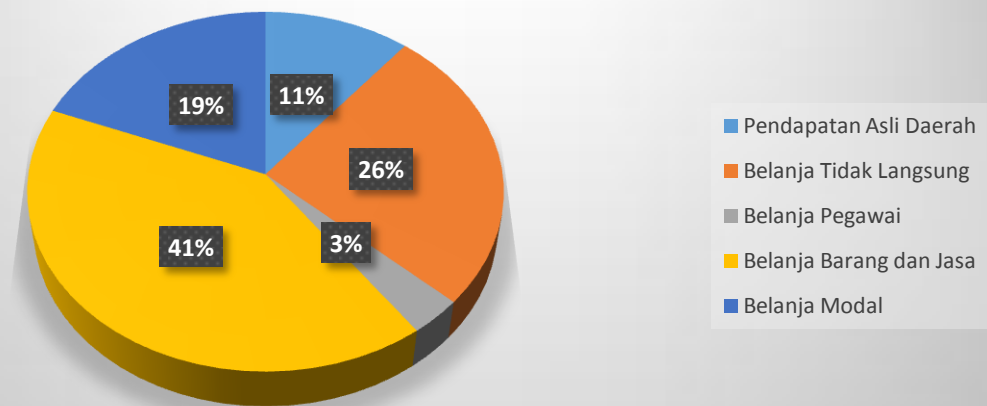
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada tahun 2018 dibiayai oleh dana belanja yang diperoleh dari dana APBD Kota Singkawang. Jumlah sumber dana keuangan dengan *surplus* (defisit) sebelum perubahan Rp. (7.547.106.843,00) dan setelah perubahan sebesar Rp. (7.185.422.113,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3. Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

NO.	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH
		DISKOMINFO	APBD KOTA
1.	Pendapatan	Rp. 1.000.000.000,00	Rp.154.358.330.760,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 154.358.330.760,00
2.	Belanja	Rp. 11.281.573.678,00	Rp.399.204.703.508,51
2.1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.370.349.463,00	Rp. 399.204.703.508,51
2.2	Belanja Langsung	Rp. 5.815.072.650,00	Rp.565.437.157.091,00
	Belanja Pegawai	Rp. 302.880.000,00	Rp. 82.445.007.846,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.769.489.850,00	Rp. 214.753.703.310,00
	Belanja Modal	Rp. 1.742.702.800,00	Rp. 268.238.445.935,00

Sumber : DPA Diskominfo 2018

Diagram 1.3. Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang



6. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sebagaimana yang diharapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selain atas usaha para personil dan dukungan dari semua pihak juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Data sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terlampir.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “*entry point*” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut :

1. Kapasitas Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampilkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang)

sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kota Singkawang, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kota Singkawang. Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Singkawang, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya, baik berupa dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, memiliki tanggung-jawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan upaya untuk terus meningkatkan beberapa aspek antara lain : kemampuan manajerial dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, pemahaman dan keahlian aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

2. Pemerataan Layanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika yang merupakan kegiatan pelayanan lalu lintas berita, uang dan barang serta merupakan jaringan yang penting dan mempunyai jangkauan terhadap perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping mempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta anggota masyarakat. Penyelenggaraan komunikasi dan

informatika mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang udara dan angkasa yang di dalamnya terdapat spektrum frekuensi radio, orbit *geostasioner*, dan orbit lainnya yang merupakan sumber daya alam yang makin terbatas. Penggunaan gelombang radio dan pemanfaatan orbit satelit sangat berkaitan dengan nilai ekonomi, keselamatan jiwa manusia, serta keamanan negara. Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan peran serta swasta, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penguasaan dan penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan industri telekomunikasi, meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Peran serta Swasta dalam Pembiayaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembangan infrastruktur secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menjadi komponen yang penting untuk keberlanjutan pembangunan. Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi atau kerjasama (*partnerships*). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan (*divestiture*) dari pemerintah kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung sebagai regulator dan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara langsung sebagai ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara.

Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembangan infrastruktur secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menjadi

komponen yang penting untuk keberlanjutan pembangunan. Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi atau kerjasama (*partnerships*). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan (*divestiture*) dari pemerintah kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung sebagai regulator dan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara langsung sebagai penyelenggara. Resiko bisnis sepenuhnya ada ditangan swasta. Berbeda dengan privatisasi, kerjasama lebih mengarah pada pengelolaan oleh swasta pada aset milik pemerintah. Selain sebagai regulator, pemerintah juga menetapkan standar pelayanan minimum yang harus disediakan swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Kerjasama yang terbentuk dapat berupa *Build-Operate-Transfer (BOT)*, *lease* atau *konsesi*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

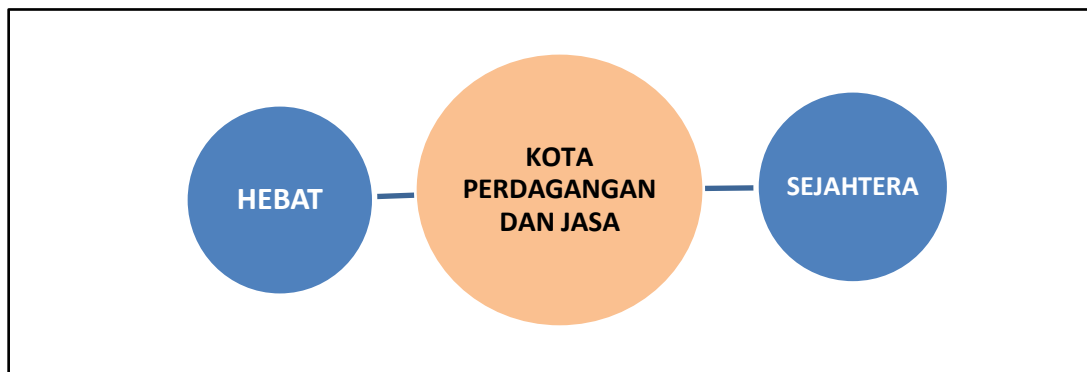
Secara nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut merupakan visi kepala daerah terpilih periode 2018-2022 :

“Singkawang HEBAT 2022”

Kata **“HEBAT”** yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan; **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan; **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Singkawang sebagai kota yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Singkawang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

- a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.
Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
- c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.
Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
- d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan an Pendidikan.
Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka.
Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-

tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

- e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata. Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota.

Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata.

Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;

- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah Dan Berkesinambungan;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata.

Dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Diskominfo merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018-2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Misi ke empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi, tujuannya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi serta sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

2. Misi

Misi dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal. Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dan menjadi aset yang potensial dalam membangun semangat kebersamaan.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya

angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 adalah **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.**

Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 yaitu : *“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”*.

3.2. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran : *“Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”*.

3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Diskominfo Kota Singkawang

yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Prosentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran. Dan ini diperjelas

melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib untuk menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja setiap satuan kerja menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjian juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud keseimbangan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yakni :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Persentase peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di Kota Singkawang	65 %	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	577.636.650,00
	Persentase peningkatan kualitas pelayanan di bidang komunikasi, informasi dan media massa	85 %	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	60.906.050,00
	Persentase peningkatan kerjasama informasi dan media	85 %	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	357.025.550,00

	massa			
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-government	40 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	2.541.406.300,00

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi	Persentase peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di Kota Singkawang	65 %	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	582.279.450,00
	Persentase peningkatan kualitas pelayanan di bidang komunikasi,	85 %	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo	58.356.050,00

komunikasi dan informasi	informasi dan media massa			
	Persentase peningkatan kerjasama informasi dan media massa	85 %	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	458.066.550,00
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-government	40 %	Program Optimalisasi Sistem Informasi <i>e-Gov</i>	2.574.627.800,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan implementasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku pelaksana sebagian kebijakan dari pemerintah daerah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

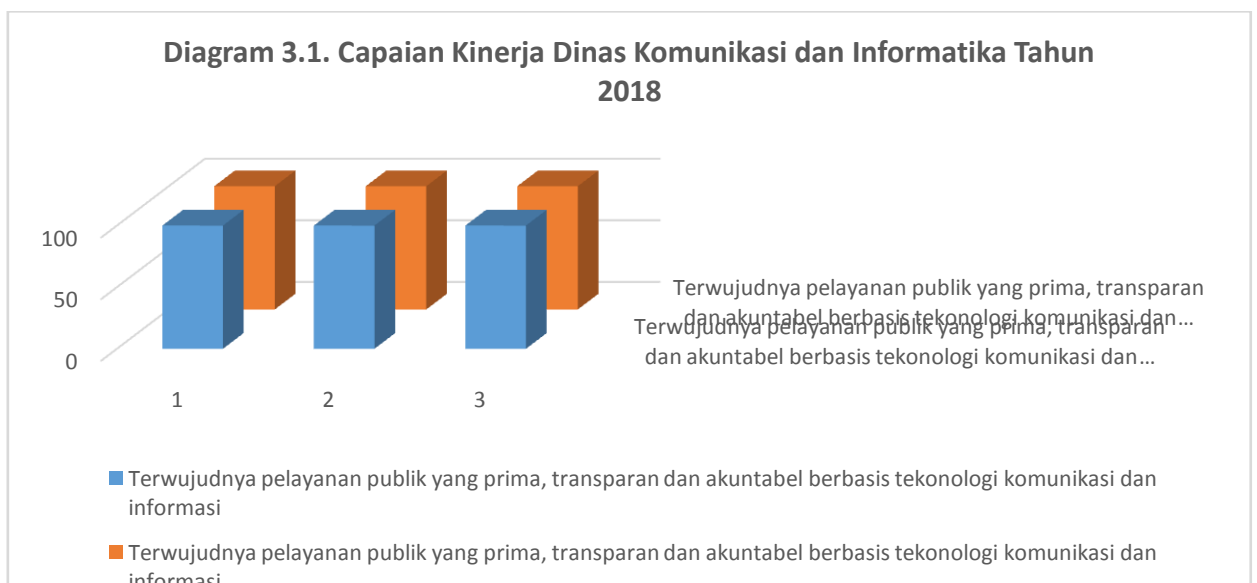
Adapun data – data dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik	100	100	100
2.		Prosentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial	100	100	100

Diagram 3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018



Dari data perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yaitu 100% termasuk dalam

rentang capaian “SANGAT BAIK”. Hal tersebut dalam konversi skala pengukuran ordinal dapat dinyatakan berhasil. Hasil capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

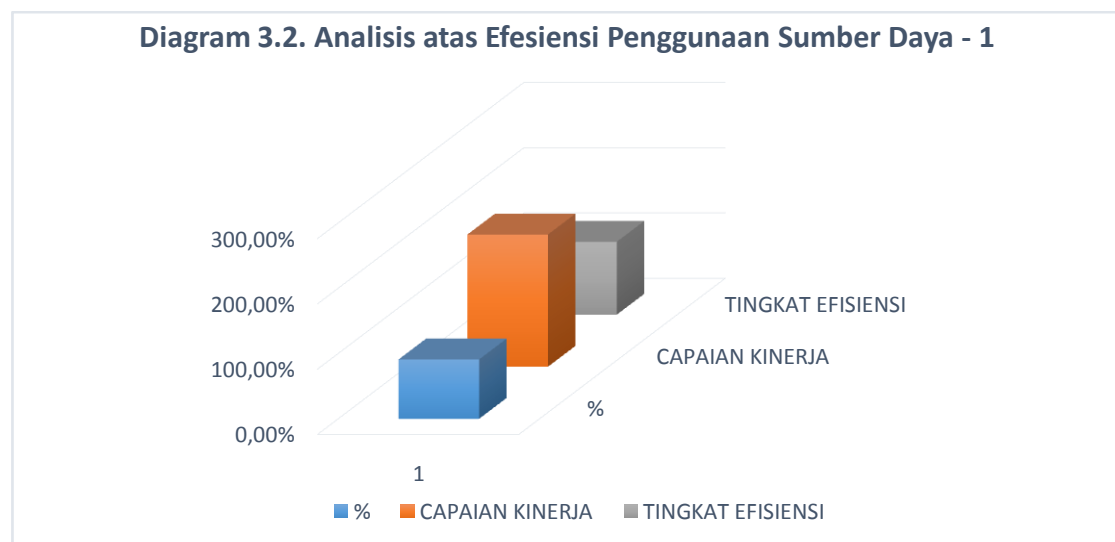
Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Indikator Kinerja Utama berupa “*Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik*”

Tabel 3.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya - 1

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Optimalisasi sistem informasi e-Gov	Rp.2.574.627.800	Rp.2.340.765.176	90,92%	202,50%	111,58%

Diagram 3.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya - 1



- b. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama berupa “*Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik*”

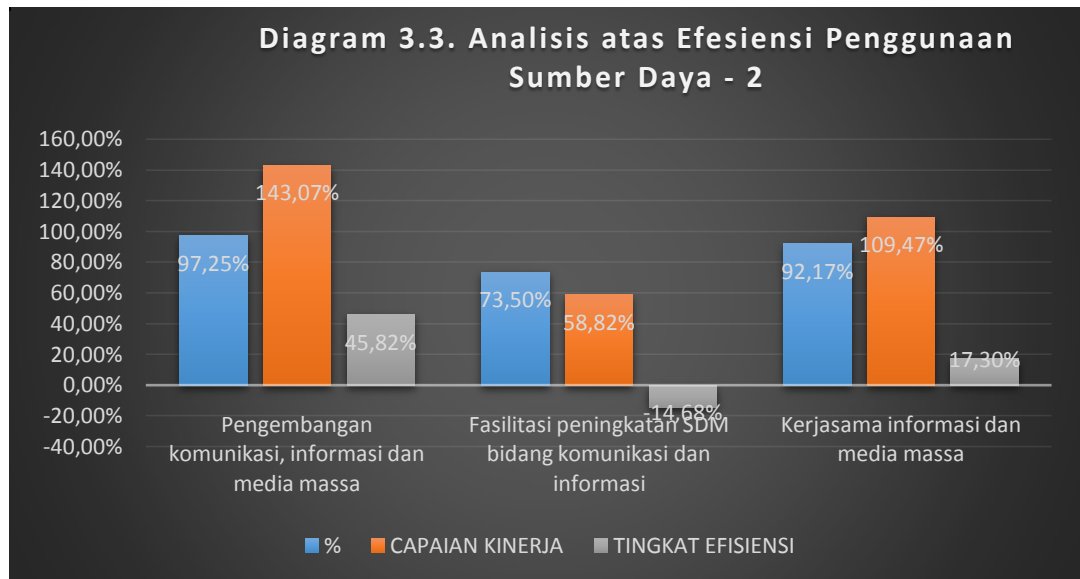
Program optimalisasi sistem informasi e-Gov :

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 90,92% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 202,50%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 111,58%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Indikator Kinerja Utama berupa “*Prosentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial*”

Tabel 3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya - 2

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp.582.279.450	Rp.566.285.300	97,25%	143,07%	45,82%
2.		Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp.58.356.050	Rp.42.890.000	73,50%	58,82%	-14,68%
3.		Kerjasama informasi dan media massa	Rp.458.066.550	Rp.422.220.000	92,17%	109,47%	17,30%



d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama berupa “*Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik*”

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa :

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 97,25% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 143,07%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 45,82%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 73,50% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 58,82%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerja **belum** mencapai 100%.

3. Program kerjasama informasi dan media massa :

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 92,17% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 109,47%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 17,30%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2018
			2016	2017	2018	
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi	- Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik	6,25%	89,65%	100%	100%
2.		- Prosentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial	100%	100%	100%	100%

Diagram 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja



Pada tahun 2016, jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan TI dalam pelayanan publik sebanyak 2 OPD yakni Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Tengah, sedangkan jumlah OPD Kota Singkawang pada tahun 2016 sebanyak 32 OPD. Pada tahun 2017 jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan TI dalam pelayanan publik sebanyak 26 OPD dari 29 OPD yang ada di Kota Singkawang (OPD yang belum memanfaatkan TI dalam pelayanan publik adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kecamatan Singkawang Utara (dikarenakan perangkat TI yang terpasang mengalami kerusakan), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Pada tahun 2018, jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan TI dalam pelayanan publik sebanyak 29 OPD dari 29 OPD sehingga realisasi pada tahun 2018 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 yakni 100%.

Pada tahun 2016, jumlah berita yang dipublikasikan melalui media (website, cetak, elektronik, sosial) sebanyak 1.100 berita, sedangkan jumlah target berita pada tahun 2016 sebanyak 1.000 berita. Pada tahun 2017, jumlah berita yang dipublikasikan melalui media (website, cetak, elektronik, sosial) sebanyak 634 berita, sedangkan jumlah target berita pada tahun 2017 sebanyak 600 berita. Pada tahun 2018, jumlah berita yang dipublikasikan melalui media (website, cetak, elektronik, sosial) sebanyak 2.085 berita (website 940 berita, berita foto 830, media sosial / instagram 365 berita), sedangkan jumlah target berita pada tahun 2018 sebanyak 2.000 berita.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Pada Program Optimalisasi Sistem Informasi *E-Gov* terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan antara lain :

- 1) Kegiatan LPSE pada Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

Belanja Pemeliharaan Server tidak dapat dilaksanakan karena di dalam DPA tercantum volume untuk pemeliharaan server sebanyak 5 unit server yang berarti untuk dapat melaksanakan pemeliharaan server dilakukan berdasarkan komponen per unit bagi server yang akan dilakukan pemeliharaan. Akan tetapi menurut kenyataan / teknis pelaksanaannya dilaksanakan pemeliharaan secara global , karena peletakan antara server ke satu dan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga apabila ada salah satu komponen dari server yang akan dipelihara, maka akan berdampak/berlaku pada seluruh server yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari temuan dan kesalahan administrasi, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Dalam rangka Pemeliharaan Server LPSE yang dilaksanakan secara global maka volume pelaksanaan di tahun 2019 dibuat menjadi 1 paket bukan per unit seperti pada DPA tahun 2018, agar kegiatan pelaksanaan server di tahun 2019 dapat dilaksanakan.

- 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi pada Belanja Jasa Design

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

Belanja Jasa Design tidak dapat dilaksanakan karena jasa design sudah terakomodir di dalam Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Untuk tahun anggaran 2019 tidak perlu lagi dianggarkan Belanja Jasa Design.

3) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Hambatan dan kendala dalam pencapaian dalam sasaran ini antara lain:

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berisi kegiatan Sosialisasi Aplikasi MANTRA tidak dapat direalisasikan dikarenakan setelah melakukan koordinasi ke Kementerian Kominfo pada Bulan November 2018 hasil yang didapat bahwa narasumber dari kementerian tidak dapat memberikan Sosialisasi Aplikasi MANTRA dikarenakan jadwal narasumber yang sudah padat.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Agar dapat melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak kementerian terkait kebutuhan mendatangkan narasumber.

B. REALISASI

Akuntabilitas keuangan meliputi Perhitungan Anggaran (PA) Neraca dan Laporan Arus Kas atas pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2018, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Berikut disajikan realisasi atas anggaran pendapatan maupun anggaran belanja berdasarkan angka realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada akhir tahun 2018.

1. Pendapatan Tahun 2018

Tabel 3.5. Realisasi PAD Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	480.430.000,00	48,04%
Jumlah		1.000.000.000,00		

Realisasi pendapatan retribusi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun anggaran 2018, secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp. 480.430.000,00 atau sebesar 48,04% dari target pendapatan sebesar Rp.1.000.000.000,00. Hambatan atau kendala tidak tercapainya target antara lain:

- Masih lemahnya sistem perencanaan, pengawasan, manajemen dan penerapan sanksi (*low enforcement*) yang dikenakan pada wajib pajak yang bermasalah.
- Masih kurangnya fasilitas sarana maupun prasarana dalam mengelola retribusi daerah.
- Masih rendahnya kualitas SDM aparat yang menangani dan mengelola retribusi daerah sehingga potensi yang ada belum tergali secara maksimal.
- Dimenangkannya gugatan wajib pajak Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga nilai tarif pungutan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang nilai tarif pungutan.
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, proses perubahannya belum selesai.

Solusi yang diambil untuk menyikapi masalah di atas adalah sebagai berikut:

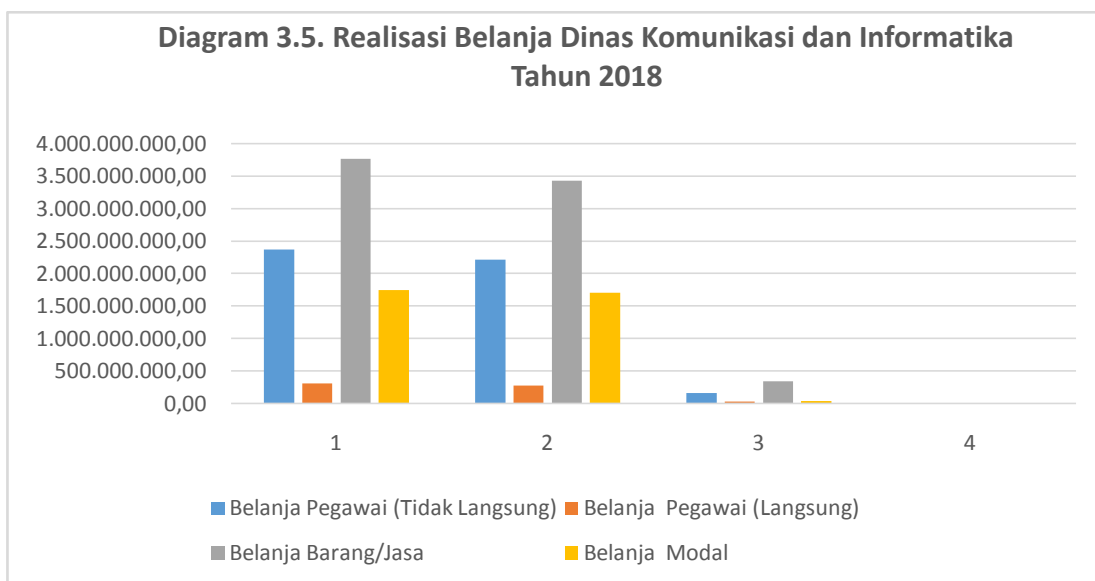
- a. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
- c. Meningkatkan kualitas SDM aparat pengelola PAD melalui kursus, bimbingan teknis, widyaloka, seminar dan studi banding.

2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.628.954.877,00 atau 93,20% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.185.422.113,00 dengan rincian :

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung				
	- Belanja Pegawai	2.370.349.463,00	2.211.452.684,00	158.896.779,00	93,30
2.	Belanja Langsung				
	- Belanja Pegawai	302.880.000,00	274.192.050,00	28.687.950,00	90,53
	- Belanja Barang/Jasa	3.769.489.850,00	3.435.903.993,00	333.585.857,00	91,15
	- Belanja Modal	1.742.702.800,00	1.707.406.150,00	35.296.650,00	97,97
	Jumlah	8.185.422.113,00	7.628.954.877,00	556.467.236,00	93,20

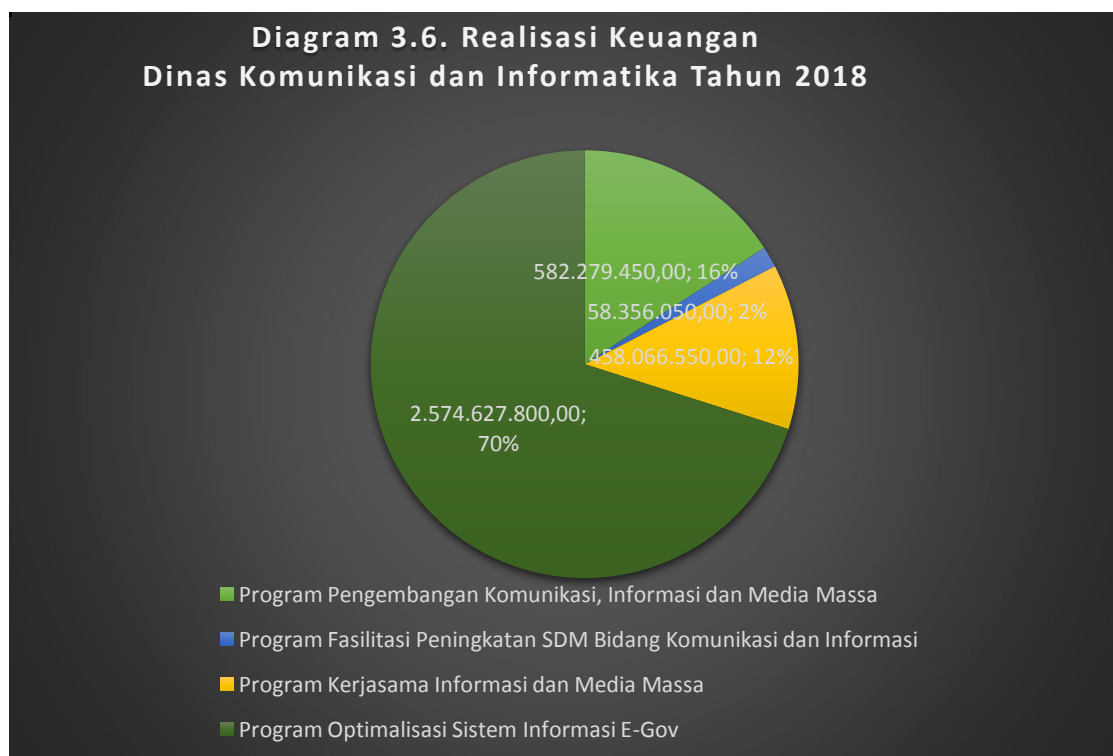


Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	582.279.450,00	65	566.285.300,00	97,25
2.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang	58.356.050,00	85	42.890.000,00	73,50

	Komunikasi dan Informasi				
3.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	458.066.550,00	85	422.220.000,00	92,17
4.	Program Optimalisasi Sistem Informasi <i>E-Gov</i>	2.574.627.800,00	40	2.340.765.176,00	90,92
JUMLAH		5.815.072.650,00	68,75	5.417.502.193,00	93,20



Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : realisasi tidak melebihi anggaran. Selain itu

berdasarkan skala pengukuran ordinal realisasi dari pelaksanaan seluruh program bisa dikatakan berhasil.

BAB IV

PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 ini, merupakan bentuk laporan dan pertanggung-jawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Laporan Kinerja Tahunan melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yaitu APBD dan Arah Kebijakan Umum (AKU) bidang kominfo yang dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.

Berdasarkan dokumen tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran yang menjadi perhatian utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

“Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi”.

Program-program dari sasaran yang termasuk dalam kategori **berhasil** adalah :

- Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

- Program kerjasama informasi dan media massa;
- Program optimalisasi sistem informasi e-Gov.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah di tuangkan dalam RKA-SKPD / DPA-SKPD / DPPA-SKPD tahun 2018 sebesar Rp. 8.185.422.113,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.628.954.877,00 atau 93,20% dari *plafond* anggaran.

Berdasarkan nilai capaian sasaran, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang telah berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya keras dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika serta dukungan dan partisipasi insan kominfo maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan program kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

- Personil yang memiliki kualifikasi teknis yang dipersyaratkan belum mencukupi dari kebutuhan;
- Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, terhadap peranan komunikasi dan informatika;
- Masih kurangnya kompetensi aparatur di bidang komunikasi dan informatika;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM terutama dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi.

Dalam upaya mengoptimalkan capaian sasaran tahun 2018 dan mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana diatasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal;
2. Dalam tugas – tugas operasional lapangan dan atau penertiban, penugasan staf tidak terbatas hanya dari satu bidang saja tetapi melibatkan staf dari bidang lain dan sekretariat;

3. Memberi kemudahan bagi staf Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan/penyediaan sarana seperti pembangunan menara bersama, CCTV publik;
5. Terus berupaya untuk mewujudkan realisasi pembangunan *control room* Pemerintah Kota Singkawang;
6. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten lain (sekitar) dibidang Komunikasi dan Informatika maupun Bidang E-Gov dan Telematika dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang didasarkan atas keikhlasan sangat kami harapkan untuk dapat mewujudkan Kota Singkawang menjadi **"SINGKAWANG HEBAT"**.

Singkawang, Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. AHYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631123 199003 1 003